BERSIH
JERNIH
CANGGIH

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM FASILITASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

Dr. Ismail, M.T.

Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Fokus Kementerian Kominfo Periode Tahun 2020 - 2024

4 Pilar Transformasi Digital

infrastruktur digital

Membangun Infrastruktur Digital dan Konektivitas yang Inklusif dengan Layanan Berkualitas Tinggi

pemerintah digital

Membangun Pemerintahan Digital yang Terbuka untuk Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Warga Negara

ekonomi digital

Meningkatkan Kapabilitas digital pada Sektor Prioritas untuk Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi

masyarakat digital

Membangun Budaya Digital dan Memberdayakan Masyarakat untuk Pengembangan Dunia Digital

Fokus Renstra Kominfo 2020-2024

- Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis & mendorong pertumbuhan yang inklusif
- Mendorong Transformasi Digital pada Sektor Ekonomi dan Pemerintahan serta Mempersiapkan Ekosistem Digital dan SDM Talenta Digital
- Memperkuat Ketahanan Nasional dan Stabilitas Polhukhankam melalui Akses Informasi dan Komunikasi Publik

Sumber: *Biro Perencanaan Kementerian Kominfo, 27 Mei 2021*

Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Percepatan Transformasi Digital Nasional (Diatur dalam UU Cipta Kerja dan Aturan2 Turunannya)

TRANSFORMASI DIGITAL

1 Segera Lakukan Percepatan Perluasan Akses dan Peningkatan Infrastruktur Digital dan Penyediaan Layanan Internet

membutuhkan

KETERSEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Dapat Menyediakan Fasilitas Bersama

- Tanah
- Bangunan
- Infrastruktur Pasif

Memberikan Fasilitasi dan/atau Kemudahan

- *right of way*
- akses terhadap gedung dan kawasan
- pungutan dan/atau retribusi yang wajar
- tarif sewa dan/atau penggunaan BMN/D yang wajar
- *interoperability*

5 LANGKAH PERCEPAT TRANSFORMASI DIGITAL

1. "Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet."
2. "Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran."
3. "Percepat integrasi pusat data nasional."
4. "Siapkan kebutuhan SDM talenta digital."
5. "Yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya."

Presiden Jokowi

Senin, 3 Agustus 2020

Materi Koordinasi Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi

Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	Materi Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Stakeholders (K/L/I)
Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (kabel tanam langsung, kabel udara (termasuk tiang), dan kabel dalam duct	1. Perizinan 2. Sewa Lahan/Retribusi 3. Pungutan Tidak Resmi dan Biaya Ormas	1. Kementerian Kominfo 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian PUPR 5. Kementerian Perhubungan 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7. Kemenko Polhukam 8. Kemenko Perekonomian
Pembangunan Menara	1. Perizinan (perubahan IMB menjadi PBG) 2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 3. Induksi Menara 4. Pungutan Tidak Resmi dan Biaya Ormas	
Pembangunan Duct	Pendampingan oleh Kementerian Kominfo terhadap Pemda dalam perencanaan awal pembangunan duct bersama, meliputi: a. Perencanaan teknis (design, estimasi biaya, jadwal pelaksanaan pembangunan) b. Pelaksanaan relokasi (*time frame*) c. Tarif sewa	
Pemanfaatan Lahan PT. KAI	Biaya pengawasan dan/atau pemanfaatan lahan PT. KAI	1. Kementerian Kominfo 2. PT. KAI 3. Kementerian BUMN 4. Kementerian Perhubungan

BERSIH
JERNIH
CANGGIH

TERIMA KASIH